

ABSTRACT

SUPERVISION MECHANISM OF INDIVIDUAL CANDIDATES IN BANDAR LAMPUNG MAYOR ELECTION 2020 (Study Case General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City)

BY

ALVILIA ZEN ALKHALIFI

Based on Law Number 7 of 2017 concerning the implementation of elections, General Election Supervisory Agency has three main powers, namely overseeing the implementation of the election stages, receiving complaints, and handling dispute cases in the election process. In the 2020 Bandar Lampung Mayor and Deputy Mayor election, there were so many problems, one of which was the issue of the individual candidate Ike Edwin-Zam Zanariah's lawsuit which began with a lawsuit against the Bandar Lampung City General Election Commission which rejected the individual candidate pair. Then the Ike Edwin - Zam Zanariah dispute lawsuit was rejected by the General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City because the General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City considered that the application in this case Ike Edwin - Zam Zanariah did not have sufficient legal evidence. The purpose of this study is to find out how the mechanism for monitoring individual candidates is carried out by the General Election Supervisory Agency Bandar Lampung City in the 2020 Bandar Lampung Mayor Election. The theory used is the theory of supervision. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that after being measured by the theory of supervision which refers to the conditions for carrying out good and correct supervision, the General Election Supervisory Agency of Bandar Lampung City has carried out supervision of individual candidates in accordance with the mechanisms and rules that apply in accordance with their authority as stated in Law Number 7 year 2017.

Keywords: General Election Supervisory Agency, District Head Election, Individual Candidates.

ABSTRAK

MEKANISME PENGAWASAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 (Studi Kasus Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

ALVILIA ZEN ALKHALIFI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki tiga kewenangan utama yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus sengketa proses pemilu. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 ada begitu banyak problematika salah satunya yaitu permasalahan tentang gugatan calon perseorangan Ike Edwin- Zam Zanariah yang berawal dari gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang menolak pasangan Calon Perseorangan tersebut. Kemudian gugatan sengketa Ike Edwin – Zam Zanariah ditolak oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung karena Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai permohonan dalam hal ini Ike Edwin – Zam Zanariah tidak memiliki alat bukti hukum yang cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan calon perseorangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Teori yang digunakan yaitu teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diukur dengan teori pengawasan yg merujuk pada syarat berjalan pengawasan yang baik dan benar, Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah menjalankan pengawasan terhadap Calon Perseorangan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci : Bawaslu, Pilwakot, Calon Perseorangan.